

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Musadad, *Alternative Dispute Resolution Resolusi Konflik Non Litigasi*, CV Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. Pertama, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, Jossey Bass Inc. Publishers, San Francisco, California, 1995.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019.
- Eko Hadi Wiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ctk. Pertama, Palanta, Desember, 2007.
- F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Ctk. Ketujuh, Binacipta, Bandung, 1980.
- Gede Aditya Pratama, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Ctk. Pertama, Mega Press Nusantara, Jawa Barat, 2023.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Kejaksaan Agung RI, Jakarta.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Ctk. Pertama, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Ctk. Kedua, Banyumedia, Malang, 2006.
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, UB Press, Malang, 2011.

- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Lintje Anna Marpaung, *Ilmu Negara*, Ed. Pertama, ANDI, Yogyakarta, 2018.
- Lusia Evy, *Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*, Genta Press, Yogyakarta, 2013.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
- Muhamad Jusuf, *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Rocky Marbun, *et.al.*, *Kamus Hukum Indonesia*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2012.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. Kedelapan, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Suyud Margono, *ADR & Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No.1 Tahun 2008*, Alfabeta, Bandung, 2012.

M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Ctk. Ketiga, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

B. Jurnal

Agus Kelana Putra, Faisal A. Rani, dan Mahdi Syahbandir, "Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian Pada Kejaksaan Tinggi Aceh)," *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2017.

Andy Sasongko, "The Application of the Legal Function of the State Attorney to Realize Legal Certainty in Civil and State Administrative Cases", *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences*, Vol. 3, No. 5, 2024.

Anindya Bidasari, *et.al.*, "Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 6, 2025.

Apriliani Kusnadi dan Devi Siti Hamzah Marpaung, "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi)", *Wajah Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2020.

Asri Sarif, "Akibat Hukum Penyimpangan Asas Ultra Petitum Partium dalam Putusan Akta Perdamaian", *Delarev*, Vol. 1, No. 3, 2022.

Atika Firdayanti, *et.al.*, "Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Berdasarkan Kewenangan Atributif Dari Undang-Undang Perkawinan." *Dinamika*, Vol. 30, No. 1, 2024.

Braham Maya Baratullah, "Strategi Mediasi Agama Dalam Perspektif Islam Dan Teori Resolusi Konflik." *EDUCATIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Agama Islam*, Vol. 12, No. 1, 2022.

Dahlioni dan Hadi Tuasikal, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia", *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 2, No. 1, 2025.

Defry T.T. dan Said Aneke R., "Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Pengacara Negara dalam Menangani Perkara Perdata", *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 11, 2021.

Desy Kosita Hallauw, *et.al.*, N, "Analisis Hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (Dati) Di Kota Ambon", *SASI*, Vol. 26, No. 1, 2020.

Dewi Prapmasari dan Destri Nudi Nugraheni, "Kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Sebagai Mediator Dalam Menentukan Nilai Ganti

- Kerugian Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta Ditinjau Dari Asas Keadilan”, *Tunas Agraria*, Vol. 8, No. 3, 2025.
- Erma Sauvia Asvia, "Konsep Mediasi Dalam Q.S. An-Nisa Ayat 35 (Perspektif Tafsir Al Misbah)." *Jurnal Studi Alquran-Hadis Dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Fitrah Humairah, *et.al.*, "Advokat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Fengky Kotalewala, Adonia Ivone, dan Novyta Uktoldeja, “Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum”, *SASI*, Vol. 26, No. 3, 2020.
- Habsyah, U., *et.al.*, D, “Tanggung Jawab Hukum Penilai Publik Untuk Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Yang Berkepastian Hukum”, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 5, 2025.
- Icha Shintya dan Suci Flambonita, “Kewenangan Kejaksaan dalam Menyelesaikan Sengketa Non Litigasi”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2024.
- Juristoffel Simanjutak, “Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)”, *Lex Administratum*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- Marwah M. Diah, "Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, 2008.
- Meirina Nurlani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Mia Hadiati dan Mariske Myeke Tampi, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di D.K.I. Jakarta” *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Muhammad Yusuf, *et.al.*, “Kedudukan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Yustika*, Vol. 21, No. 2, 2018.
- N.M.T. Dewi, “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata”, *Jurnal Analisis Hukum*, 2022.

- R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, 2023.
- Rahmawaty Maruf, "Efektivitas Peran Mediator dalam Konflik Hukum Perdata", *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 5, No. 1, 2025.
- Ridwan Jamal, "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15, No. 2, 2017.
- Rini Fitriani, *et.al.*, "Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Hasil Kesepakatan Perdamaian dalam Mediasi di Luar Pengadilan." *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2024.
- Selamat dan Lumban Gaol, "Pengaturan Hukum Mediasi Di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 7, No.1, 2016.
- Sri Puspitaningrum, "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan", *Spektrum Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2018.
- Urip Santoso, "Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum", *Perspektif*, Vol. 21, No. 3, 2016.
- Wina Purnamasari, Fakhruddin, dan Ahmad Dibul Amda, "Problematika Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 13, No. 1, 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Het Herziene Indonesisch Reglement.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lainnya dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 249 Tahun 2020 tentang Standar Operating Prosedur di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

D. Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2004.

E. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, <https://kbbi.web.id/>. Diakses terakhir pada tanggal 26 Maret 2026 jam 17.00.

Lugas Subarkah, *Uang Ganti Rugi Tol Jogja–Solo Beda-beda, Warga Sleman Protes*, <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2023/01/18/512/1123611/uang-ganti-rugi-tol-regional-solo-beda-beda-warga-sleman-protes>. Diakses terakhir pada tanggal 25 Maret 2026 jam 09.00.